

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DI KELURAHAN MAMBORO KECAMATAN PALU UTARA

**Ahmad Fauzan**

*alifhaminda118@gmail.com*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*This research is aimed at analyzing the implementation of the national program for strengthening their self-funded community. In addition, it is also aimed at analyzing factors both hampering and supporting the implementation of the national programs for community self-empowerment at the village of Mamboro. The research method applied is descriptive-qualitative. The Informant of this research are The Leader Of PNPM Unit, The Village Chief of Mamboro And Mamboro Barat, The BKM Nadoli member, The Village Supervisor, and The Targeting People. The types of data are primary data and secondary data. The data of the study is obtained through observations, interviews, and documentation. The result of the study indicates that the implementation of PNPM policy has run well although some hampering and supporting factors still take place during the period of the policy implementation.*

**Key words:** *Implementation, PNPM Mandiri, Empowering,*

Program PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sesungguhnya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga. Yang menjadi ciri khas dari PNPM Mandiri, program ini melakukan penyaluran pendanaan operasional ke kegiatan secara langsung ke masyarakat tidak melalui Pemerintah Daerah. Mekanisme melalui rembuk desa dengan Fasilitator PNPM Mandiri mengangkat isu yang dijadikan kegiatan berupa kebutuhan untuk mengurangi beban-beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mendorong peningkatan tabungan masyarakat

Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara merupakan salah satu Kelurahan di Kota Palu yang merupakan salah satu sasaran program PNPM Mandiri. Penerapan/implementasi program PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara juga dilaksanakan mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan program PNPM yang di koordinir serta diawasi oleh LSM setempat. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 1997).

Program PNPM di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara tersebut bertujuan untuk mewujudkan keswadayaan masyarakat serta meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Pemberdayaan dimaksud tidak hanya sebatas ekonomi saja, namun juga secara politis dan sosial budaya, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kompetitif, baik secara lokal maupun nasional. Paradigma pemberdayaan ini ingin

mengangkat kondisi yang serba sentralistik (*top down*) ke situasi yang lebih otonom (*bottom up*) dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri, kelompok orang miskin ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain (Soetrisno, 1995).

Di harapkan juga nantinya, partisipasi dalam program PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara ini bukan hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh warga yang termasuk dalam kategori miskin saja, namun juga dilakukan oleh semua elemen masyarakat, sehingga terdapat suatu hubungan saling mengisi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Adanya pemekaran Kelurahan Mamboro menjadi Kelurahan Mamboro dan Mamboro Barat pada tahun 2011 yang diresmikan pada tahun 2012 membuat pelaksanaan PNPM Mandiri di kelurahan ini sedikit mengalami hambatan, hal ini dikarenakan pemekaran kelurahan tersebut tidak dibarengi dengan pembentukan BKM di kelurahan Mamboro Barat sebagai pemekaran dari kelurahan induk sehingga kelembagaannya menjadi pincang, program terus berlanjut namun dengan wilayah yang sudah terbagi secara administratif. Secara teknis, pelaksanaan program akan mengalami kepincangan secara kewilayahan dimana pembagian pekerjaan atau bantuan dalam program ini akan sulit untuk ditentukan.

Salah satu kendala di Kelurahan Mamboro dan Mamboro Barat adalah belum tersusunnya dokumen perencanaan baik itu Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri sepenuhnya berkiblat pada PJM – Pronangkis BKM Nadoli Kelurahan Mamboro. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan strategi pemerintah dimana PNPM Mandiri

merupakan program pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan berbasis komunitas yang harusnya dipadukan dengan perencanaan daerah untuk menciptakan harmonisasi dalam proses pembangunan. Belum adanya dokumen perencanaan dikelurahan akan membuat pembangunan tidak terukur dan terkesan tidak terencana sehingga akan berpengaruh pula pada pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Mamboro Barat.

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PNPM Mandiri di kelurahan Mamboro, peneliti mencoba mengacu pada model yang dikembangkan oleh ahli studi implementasi kebijakan seperti Edward III. Menurut Edward III dalam Winarno (2002), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara ?

## METODE

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu

dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisanya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983: 105). Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. Alasan memilih lokasi tersebut, sebagai berikut:

- a. Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara merupakan salah satu lokasi sasaran PNPM Mandiri yang memperoleh bantuan sejak peluncurannya tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- b. Sebagai salah satu lokasi sasaran PNPM Mandiri, terjadi pemekaran kelurahan dari kelurahan Mamboro menjadi Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Mamboro Barat yang berpengaruh pada proses implementasi PNPM Mandiri di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro terdiri dari dua program, yaitu PNPM Inti dan PNPM Penguatan, Dimana PNPM Inti adalah PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Penguatan adalah Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP).

Implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro memberi makna dan ruang lingkup kajian yang cukup kompleks, dari beberapa kajian tersebut terdapat pendekatan-pendekatan yang efektif dan populer dikalangan masyarakat akademik yaitu konsep Edward III yang meliputi empat unsur yaitu : 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi. Unsur-unsur ini sebagai aspek pengukuran implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro.

Pembahasan berikut ini peneliti menguraikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Satker PNPM Mandiri Perkotaan, Lurah Mamboro Dan Mamboro Barat, tokoh masyarakat, anggota BKM, dan Anggota KSM tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara berdasarkan empat indikator yang dikemukakan oleh Edward III, sebagai berikut:

### **Faktor Komunikasi**

Komunikasi menunjukkan suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi mengandung pengertian yang begitu bermakna apabila dikorelasikan dengan organisasi atau lembaga yang akan melaksanakan program., demikian halnya komunikasi sangat menentukan sukses tidaknya PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro . Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang akan berkomunikasi membicarakan bagaimana agar program

tersebut dapat berjalan dengan baik. Orang-orang yang menjadi sasaran program tersebut merupakan kelompok masyarakat, yang memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan dalam melaksanakan PNPM Mandiri.

Adanya komunikasi yang lancar, maka pada gilirannya dapat menghasilkan kemandirian masyarakat yang terwujud pada berhasilnya PNPM Mandiri. Hasil maksimal dalam komunikasi dipengaruhi oleh upaya-upaya positif, sedangkan upaya positif untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok adalah kemampuan yang dapat saling memahami, mendukung, dalam mengembangkan kebijakan yang menjadi komitmen bersama kearah pencapaian tujuan. Terkait dengan pembahasan implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan komunikasi, maka peneliti mengacu pada 3 Indikator, yaitu Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi yang dilakukan aparat pemerintah, anggota BKM dan masyarakat dalam melaksanakan PNPM yang terlihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap PNPM Mandiri melalui sosialisasi.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011: 97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Faktor komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dikelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dapat disimpulkan terjadi beberapa ketimpangan antara lain dalam hal transmisi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa intensitas sosialisasi yang kurang menimbulkan kekurangan informasi bagi warga masyarakat selama ini tentang PNPM Mandiri, dalam hal kejelasan juga masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi selama ini, hal ini membuat PNPM Mandiri dipahami masyarakat secara umum saja tanpa tahu dimensi-dimensi apa yang harus dipenuhi oleh segala lapisan masyarakat dan pelaksana PNPM itu sendiri, sebut saja mengenai kriteria kemiskinan, pemberdayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam PNPM Mandiri. Faktor yang menguatkan Komunikasi adalah konsistensi, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, segala perintah atau aturan selalu berkesinambungan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri.

#### **Faktor Sumber Daya**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya merupakan alat penggerak yang sangat efektif bagi kelangsungan implementasi kebijakan, apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan jika hanya dalam angan-angan dan rencana belaka pasti hasilnya nol, sehingga implementasi kebijakan tersebut pasti tidak dapat berjalan lancar.

Sumber daya merupakan kekuatan atau unsur yang paling utama sebagai pendukung setiap organisasi, agar unsur-unsur tersebut dapat memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan PNPM Mandiri. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara memadai dan jelas, akan tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan

meliputi: staf (sumber daya manusia) dan Informasi (Data Profil, Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan PJM Pronangkis BKM).

Secara umum dapat disimpulkan kemampuan sumber daya di Kelurahan Mamboro baik sumber daya aparat dan anggota BKM serta fasilitator dikategorikan berhasil, artinya bahwa sumber daya manusia atau kemampuan yang dimiliki oleh aparat Kelurahan Mamboro maupun anggota BKM Nadoli sangat menunjang berhasilnya implementasi kebijakan PNPM Mandiri. Namun, sumber daya berupa data perencanaan yang berbasis profil kelurahan sebagai acuan dasar pengambilan kebijakan belum tersusun sehingga masih menggunakan PJM Pronangkis BKM Nadoli.

Dari pembahasan di atas mengenai faktor sumber daya, peneliti menyimpulkan bahwa dari indikator staf sudah sangat memadai, namun dari segi informasi Kelurahan Mamboro dan Mamboro Barat belum memiliki data dasar serta dokumen perencanaan seperti yang dikatakan Edward III bahwa informasi terbagi dua, yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam peraturan-peraturan mengenai PNPM Mandiri yang secara umum dimiliki oleh setiap Kelurahan, BKM dan Fasilitator Kelurahan. Tetapi, informasi kedua yang berhubungan dengan data kepatuhan terhadap regulasi semacam dokumen Renstra, Renja dan Profil Kelurahan yang wajib dimiliki sebagai dasar perencanaan pembangunan justru tidak dimiliki oleh kelurahan Mamboro dan Mamboro Barat. Sehingga disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro belum maksimal.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan dan komitmen kemungkinan besar melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti dukungan, komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (Edward III dalam Setiawan, 2010).

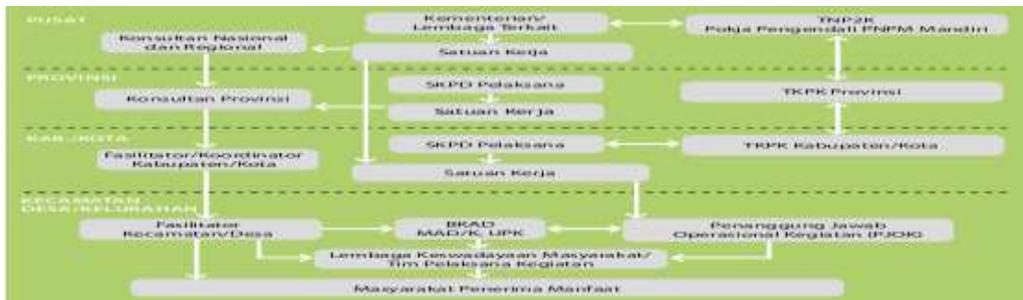
Berdasarkan hasil wawancara, dan ditunjang dengan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Mamboro terdorong untuk membantu dan terlibat dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri, tidak terlepas dari komitmen masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan ketergantungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi di Kelurahan Mamboro dikategorikan berhasil. Hal ini terlihat dari tanggapan informan tentang komitmen dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro sangat antusias.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada. Adapun indikator dari birokrasi yang peneliti gunakan meliputi : *Standart Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi (Penyebaran Kewenangan).

**Gambar 1**  
**Skema Koordinasi PNPM Mandiri**



Sumber: Paket Informasi PNPM Mandiri 2012 – 2013 Hal. 13

Adapun SOP dalam pelaksanaan PNPM Mandiri telah diatur dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, antara lain:

**Gambar 2**



Sumber: Paket Informasi PNPM Mandiri 2012 – 2013 Hal. 15

Dari gambaran yang di dapat dari wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadi fragmentasi dalam struktur birokrasi di Kelurahan Mamboro, dimana terdapat ketimpangan tanggung jawab dalam pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya di Kelurahan Mamboro Barat.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi

berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005: 153-154):

"*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan

terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.

”Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Senada dengan teori diatas, peneliti berkesimpulan bahwa Kelurahan Mamboro Barat dengan semangat euforia pemekaran ingin memajukan wilayahnya dengan penerapan PNPM Mandiri secara terpisah dengan kelurahan induk, namun fragmentasi yang tidak dibarengi dengan kewenangan formal dan kelembagaan yang belum terbentuk memunculkan sikap apatisme dan ketakutan dalam bertindak.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi permasalahan dalam struktur birokrasi dalam implementasi PNPM Mandiri di kelurahan Mamboro Barat. Hal ini terlihat dari fragmentasi yang terjadi dalam struktur birokrasi, tetapi dalam faktor pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP telah dijalankan sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro belum optimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Dilihat dari faktor komunikasi, proses sosialisasi yang dilakukan oleh BKM “Nadoli”, Fasilitator PNPM Mandiri, serta dukungan aparat kelurahan masih dirasakan sangat kurang. Intensitas

sosialisasi sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal, sehingga dilihat dari transmisi, dan kejelasan bagaimana PNPM Mandiri sebagai program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan dirasakan belum begitu dipahami oleh masyarakat. Hal yang mendukung dari faktor komunikasi adalah variabel konsistensi dalam komunikasi yang dilakukan oleh BKM “Nadoli”, Fasilitator PNPM Mandiri, serta aparat kelurahan Mamboro selalu konsisten dalam mengkomunikasikan segala kebijakan dari atas.

2. Dalam faktor sumber daya, terdapat kekurangan dalam informasi yang diartikan sebagai data yang harus dimiliki sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan seperti Rencana Strategi, Rencana Kerja, serta Profil Kelurahan. Hal ini membuat dalam penyusunan kebijakan PNPM Mandiri masih di dominasi oleh PJM Pronangkis BKM “Nadoli”, padahal salah satu strategi pemerintah adalah mengharmonisasi PNPM Mandiri dengan perencanaan daerah. Faktor sumber daya yang mendukung adalah sumber daya manusia, staf pelaksana yang terdiri dari anggota BKM Nadoli, Fasilitator serta aparat kelurahan yang punya pengalaman serta kapasitas yang menjamin pelaksanaan tersebut.
3. Faktor disposisi adalah faktor yang memperkuat adanya pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro, adanya dukungan dan komitmen baik itu dari masyarakat, BKM, Aparat kelurahan maupun Fasilitator membuat disposisi atau kecenderungan dari pelaku kebijakan dan masyarakat sangat kuat dalam mendukung implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro.
4. Faktor struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Mamboro, hal ini dikarenakan terjadinya

fragmentasi pada struktur organisasi, adanya pemekaran kelurahan yang tidak dibarengi dengan pembentukan BKM di wilayah Kelurahan Mamboro Barat sebagai wilayah pemekaran menjadi masalah dalam koordinasi dan kewenangan, terjadinya penyebaran tanggung jawab yang tidak dibarengi dengan kewenangan secara formal. Dalam pelaksanaan SOP menurut peneliti tidak ada kendala dan tetap dilaksanakan sesuai prosedur tetap sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri.

### Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri dengan Kemandirian masyarakat, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk diperhatikan yaitu antara lain :

1. Dalam upaya tercapainya visi, misi, tujuan serta keberlanjutan PNPM Mandiri, BKM selaku fasilitator serta ujung tombak kegiatan program kemiskinan nasional perlu melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan serta peningkatan pemahaman mereka tentang kedudukan BKM dalam PNPM Mandiri yang memiliki perananan penting bagi terwujudnya kemandirian masyarakat di Kelurahan Mamboro . Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan anggota BKM dengan rutin dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar-seminar program kemiskinan nasional, pendidikan lanjutan tentang PNPM Mandiri secara nasional, dan mengadakan studybanding bagi anggota BKM ke Kelurahan yang dianggap berhasil dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri yang telah mampu meningkatkan kemandirian masyarakatnya;
2. Perlunya pembentukan BKM baru bagi wilayah Kelurahan Mamboro Barat sehingga masyarakat Mamboro Barat dapat melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri terpisah dari kelurahan induk, hal ini untuk

mencegah ketimpangan dalam segi koordinasi dan mencegah timbulnya konflik horizontal. Adanya pembentukan BKM tersendiri di kelurahan Mamboro Barat juga diharapkan menjadikan manfaat Program ini lebih optimal dirasakan oleh masyarakat miskin.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Kehadirat ALLAH S.W.T atas segala berkah dan anugerah-Nya, shalawat dan salam atas Rasul-Nya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, khususnya kepada Bapak Dr. Muzakir Tawil, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Imam Sofyan, M.Si selaku pembimbing anggota, Bapak Dr. Nawawi Natsir M.Si selaku ketua tim penguji sekaligus Koordinator Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako atas segala saran, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian artikel ini tahap demi tahap hingga proses ujian, semoga bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik, Konsep Tipologi Penelitian, dan Strategi Pemanfaatannya*. Malang: Fia Unibraw dan IKIP.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Muhamad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paket Informasi PNPM Mandiri 2012 – 2013
- Setiawan. 2010. *Analisis implementasi program Penanggulangan kemiskinan perkotaan Di kelurahan nambo padang Kecamatan luwuk kabupaten banggai*. Tesis. Palu: Pasca Sarjana UNTAD
- Sutrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jogyakarta: Kanisius.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media